



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1514, 2021

KEMENKEU. DBH DR. Penggunaan. Pemantauan.
Evaluasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 216/PMK.07/2021

TENTANG

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

- Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.
8. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
9. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara.
10. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut

secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

11. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
13. Kesatuan Pengelola Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
14. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang dipungut dari hutan alam.
15. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan negara.
16. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat RKP DBH DR adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.

17. Sisa DBH DR Provinsi adalah selisih lebih antara DBH DR yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada pemerintah provinsi dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
18. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota adalah DBH DR yang merupakan bagian kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran 2016, yang masih terdapat di rekening kas umum daerah.

BAB II

PENGGUNAAN DBH DR

Bagian Kesatu

Prinsip Penggunaan DBH DR

Pasal 2

- (1) DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangan provinsi;
 - b. rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi;
 - c. pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial;
 - e. operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - f. pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - g. perlindungan dan pengamanan hutan;
 - h. pengembangan perbenihan tanaman hutan;
 - i. penyuluhan kehutanan; dan/atau
 - j. strategis lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan perekonomian di Daerah

termasuk namun tidak terbatas melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, dan/atau bantuan bibit.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menugaskan bupati/wali kota melalui tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Sisa DBH DR Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
 - b. pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - c. pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya;
 - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya;
 - f. konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
 - g. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. penyuluhan lingkungan hidup; dan/atau
 - i. strategis lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan perekonomian di Daerah termasuk namun tidak terbatas melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, dan/atau bantuan bibit.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat Daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota.

Pasal 4

- (1) Kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dan Pasal 3 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi:
 1. masyarakat di sekitar hutan; dan/atau
 2. masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - b. penguatan perekonomian Daerah, meliputi:
 1. pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;
 2. dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;
 3. pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
 4. pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;
 5. pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau
 6. pengembangan destinasi pariwisata kehutanan; dan
 - c. pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi meliputi:
 1. kinerja pengelolaan sampah;
 2. kinerja pengelolaan air limbah;
 3. kinerja sanitasi lingkungan; dan/atau
 4. kinerja rehabilitasi hutan dan lahan, kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria;
- a. penerima bantuan;
 - b. besaran bantuan;
 - c. jangka waktu pemberian bantuan; dan
 - d. kondisi pemberian bantuan,
- dengan memperhatikan dampak pemberian bantuan terhadap peningkatan pengelolaan hutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling kurang dengan mempertimbangkan:
 - a. indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. kriteria kabupaten/kota atau desa penerima insentif;
 - c. mekanisme penilaian kinerja; dan
 - d. besaran insentif.
 - (4) Kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.
 - (5) Pelaksanaan kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi:
 - a. DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi; atau
 - b. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi 15% (lima belas persen) dari alokasi:
 - a. DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi; atau
 - b. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga

terkait.

Pasal 5

- (1) Provinsi atau kabupaten/kota dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari:
 - a. DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi; atau
 - b. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota,untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DBH DR yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada standar biaya di Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
- (2) Dalam pelaksanaan penggunaan:
 - a. DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi; atau
 - b. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota,gubernur atau bupati/wali kota dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH DR dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di wilayahnya.

Bagian Kedua

RKP DBH DR

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah menyusun RKP DBH DR berisi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi mengoptimalkan penggunaan seluruh anggaran Sisa DBH DR Provinsi dan alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengoptimalkan penggunaan seluruh anggaran Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.
- (2) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. alokasi DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang dianggarkan;
 - b. rincian dan lokasi kegiatan;
 - c. target keluaran kegiatan;
 - d. rincian pendanaan kegiatan;
 - e. metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kegiatan penunjang.
- (3) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi melaksanakan pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Pemerintah Daerah paling lambat bulan November pada tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Gubernur dapat mengoordinasikan pembahasan penyusunan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersama bupati/wali kota, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. target capaian keluaran;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. besaran penganggaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota;
 - d. besaran penganggaran untuk kegiatan strategis lainnya; dan
 - e. besaran persentase kegiatan penunjang.
- (2) Hasil pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Daerah menetapkan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBD.

Pasal 9

Dalam penyusunan rancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat untuk menentukan lokasi kegiatan berdasarkan peta lahan kritis, peta kebakaran hutan dan lahan, dan peta penutupan lahan.

Bagian Ketiga
Laporan Realisasi Penggunaan

Pasal 10

- (1) Gubernur menyusun laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tiap semester.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Bupati/wali kota menyusun laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tiap semester.
- (4) Laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretariat Jenderal, dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama diterima paling lambat tanggal 20 Agustus tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan sampai dengan semester kedua diterima paling lambat tanggal 20 Februari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal tanggal 20 Agustus dan 20 Februari bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari kerja berikutnya.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. eselon I pembina masing-masing kegiatan serta Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
 - a. kepatuhan penyampaian laporan;
 - b. realisasi capaian keluaran;
 - c. kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. besaran penganggaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/kota;
 - e. besaran penganggaran untuk kegiatan strategis lainnya; dan
 - f. besaran persentase kegiatan penunjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas realisasi DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota;

- b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. eselon I pembina masing-masing kegiatan atas pelaksanaan kegiatan dan capaian keluaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota di Daerah; dan
- c. Kementerian Dalam Negeri atas perencanaan dan penganggaran kegiatan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi, atau sisa DBH DR Kabupaten/Kota dalam APBD dan/atau APBD Perubahan.

Bagian Kedua

Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

Pasal 12

- (1) Untuk menghitung besaran Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang masih terdapat di rekening kas umum daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah tahun anggaran berakhir, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
- (2) Gubernur dapat mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal masih terdapat Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dimaksud dianggarkan seluruhnya atau bertahap dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Penundaan Penyaluran, Penyaluran Kembali, dan Penghentian Penyaluran

Pasal 13

- (1) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a tidak memenuhi kesesuaian proporsi alokasi kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) serta proporsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai penyaluran triwulan III terhadap DBH DR bagi provinsi atau DBH sumber daya alam kehutanan PSDH dan IIUPH bagi kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota semester pertama tidak diterima sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai penyaluran triwulan III dan triwulan IV terhadap DBH DR bagi provinsi atau DBH sumber daya alam kehutanan PSDH dan IIUPH bagi kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sampai dengan semester kedua tidak diterima sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai penyaluran triwulan I dan triwulan II terhadap DBH DR bagi provinsi atau DBH sumber daya alam kehutanan PSDH dan IIUPH bagi kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali DBH triwulan III yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam hal daerah telah menyampaikan perbaikan laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a yang menunjukkan kesesuaian proporsi alokasi kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) serta proporsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali DBH triwulan III dan triwulan IV yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a.
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali DBH triwulan I dan triwulan II yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi

penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sampai dengan semester kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perbaikan laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) belum diterima sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH triwulan III yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) belum diterima sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH triwulan III dan triwulan IV yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sampai dengan semester kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) belum diterima sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH triwulan I yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (4) Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- (5) Dalam hal tanggal 15 November bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sampai dengan semester kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b tidak memenuhi kesesuaian proporsi alokasi kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) serta proporsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai penyaluran triwulan I terhadap DBH DR bagi provinsi atau DBH sumber daya alam kehutanan PSDH dan IIUPH bagi kabupaten/kota.
- (2) Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Batas waktu penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2024.
- (2) Dalam hal setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat Sisa DBH DR Kabupaten/Kota, Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau DBH sebesar Sisa DBH DR yang masih ada di rekening kas umum daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

- (3) Pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 18

Sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DBH DR dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penggunaan DBH DR dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 20

Ketentuan mengenai:

- a. rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- b. contoh format RKP DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- c. pedoman penyusunan rancangan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- d. contoh format laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Daerah yang telah menetapkan RKP DBH DR tahun anggaran 2022 sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, melakukan penyesuaian program/kegiatan penggunaan DBH DR berdasarkan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH DR dan sisa DBH DR Provinsi serta Sisa DBH DR Kabupaten/Kota tahun anggaran 2021 tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 216/PMK.07/2021
 TENTANG
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER
 DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

A. Rincian Kegiatan Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN DBH DR DAN SISA DBH DR PROVINSI

| No. | Program | Kegiatan | Output | Penerima Manfaat |
|-----|---|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangannya | DBH Kehutanan, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi: a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL). Rencana Pembangunan Hutan Kota; b. Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya; c. Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan: 1) Pembangunan Hutan Hak; 2) Penghijauan lingkungan; 3) Pembangunan Hutan kota; 4) Penerapan teknik konservasi tanah dan air termasuk pada ekosistem mangrove dan gambut. d. Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan; e. Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 26 Tahun 2020. | Dokumen Dokumen Ha Ha Ha Ha Kegiatan Ha | 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|---|--|--|---|
| 2. | Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangannya | <p>a. Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya</p> <p>1) Penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah bertindak sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)</p> <p>2) Budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah);</p> <p>3) Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)</p> <p>b. Rehabilitasi hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi:</p> <p>1) Penanaman mangrove dan hutan pantai diluar kawasan</p> <p>2) Penanaman oleh pemegang izin Perhutanan Sosial sesuai rencana kegiatan Perhutanan Sosial.</p> <p>c. Rehabilitasi lahan dan taman Hutan raya yang terdiri atas:</p> <p>1) Penghijauan;</p> <p>2) Reboisasi;</p> <p>3) Pemeliharaan tanaman;</p> <p>4) Pengayaan tanaman;</p> <p>5) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;</p> <p>6) Penanaman pohon kanan kiri sungai; dan</p> <p>7) Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.</p> | <p>(4)</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> | <p>(5)</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|---|--|--|---|
| 3. | Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan | <p>a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Tahura)</p> <p>1) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura;</p> <p>2) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet);</p> <p>3) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura</p> <p>b. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu;</p> <p>c. Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu;</p> <p>d. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;</p> <p>e. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan;</p> <p>f. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati;</p> <p>g. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;</p> <p>h. Pembudayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya;</p> <p>i. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu;</p> <p>j. Pembudayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;</p> <p>k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;</p> | <p>(4)</p> <p>Dokumen</p> <p>Unit</p> <p>Unit KK</p> <p>Dokumen/Rekomendasi</p> <p>Dokumen/Rekomendasi</p> <p>Jumlah izin</p> <p>Jumlah pemanfaatan</p> <p>Lokasi</p> <p>Jumlah izin</p> <p>Lokasi</p> <p>Dokumen/Rekomendasi</p> <p>Unit</p> <p>Laporan</p> | <p>(5)</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|----------------|--|--|--|
| | | <p>l. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun;</p> <p>m. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun;</p> <p>n. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;</p> <p>o. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik</p> <p>1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk Appendix CITES melalui pengawasan, patroli dan sosialisasi</p> <p>2) Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/KPA melalui invent potensi kehati spesies dan genetik</p> <p>3) Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi</p> <p>4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi</p> <p>5) Pengembangan sistem data base kehati daerah provinsi (Balai Kliring)</p> <p>6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati</p> <p>7) Pembinaan dan edukasi kepada Kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan dan kawasan Konservasi</p> <p>8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;</p> | <p>Dokumen</p> <p>Laporan</p> <p>Dokumen</p> <p>Entitas</p> <p>Hektar</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Unit</p> <p>Sistem</p> <p>Lokasi</p> <p>Unit KE-E</p> | <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|---|--|---|--|
| | | a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat b) Penyediaan Sarpras Pengelolaan c) Pendidikan/Penelitian dan Penyelebaran d) Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati e) Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat | | 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| 4. | Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial | a. Fasilitasi penyiapan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKM Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat 1) Operasional POKJA PPS; 2) Sosialisasi tingkat tapak; 3) Fasilitasi Usulan Izin PS; 4) Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat; 5) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/atau 6) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan lokal. b. Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 1) Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial; 2) Pelatihan pengembangan usaha/kerjasama usaha; 3) Pelatihan pengembangan kewirausahaan; | Jumlah Lokasi Jumlah Kegiatan Jumlah lokasi Jumlah Calon Lokasi PS Jumlah Lokasi Konflik MHA Jumlah Komunitas MHA Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah KUPS Jumlah KUPS | 1. Pemerintah 2. Masyarakat POKJA PPS Provinsi Kelompok Masyarakat sekitar Hutan Kelompok Masyarakat sekitar Hutan Masyarakat yang berkonflik Komunitas MHA Komunitas MHA dan Pengampu kearifan lokal KUPS KUPS KUPS |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|---|---|--|---|
| | | 4) Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial; 5) Pembangunan agroforestry; 6) Pemberian bantuan alat ekonomi produktif; 7) Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial a) Sarpras pendukung pelaksanaan pendampingan b) Operasional Pendamping 8) Pengawasan dan Pengendalian PS a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok PS b) Sarpras pendukung pelaksanaan Money Pembelian Akses Kelola Masyarakat melalui Kemitraan Konservasi (Hektar) | Jumlah KUPS Jumlah KUPS Paket Unit Jumlah Pendamping Kegiatan Unit | KUPS KUPS KUPS Pemerintah & KUPS KUPS Pemerintah & KUPS Pemerintah & KUPS |
| | | c. 1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Kemitraan Konservasi; 2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaan; 3) Perjanjian Kerja Sama; 4) Pelatihan Masyarakat; | Hektar Desa/Kelompok Perjanjian Kelompok | Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat |
| | | d Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Konservasi 1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; 2) Pembentukan Kelembagaan; 3) Pelatihan Masyarakat; 4) Pemberian Bantuan Usaha; | Desa/Kelompok Kelompok Kelompok Unit | Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat |
| 5. | Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan | Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan 1) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan perlindungan hutan; | | Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi. |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|----------------|---|--|---|
| | | <p>a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perubahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin (diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut) secara partisipatif.</p> <p>b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perubahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan melalui penguatan Resort Based Management (RBM).</p> <p>2) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery);</p> <p>a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan Hutsos;</p> <p>b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Masyarakat di Wilayah KPH;</p> <p>c) Fasilitasi Pendampingan Penanganan Pascapanenan dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH;</p> <p>3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH</p> <p>a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM;</p> <p>b) Operasional KPH;</p> | <p>Lokasi</p> <p>Lembaga</p> <p>Kegiatan</p> <p>Orang</p> <p>Bulan</p> | <p>Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.</p> |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|----------------|--|--|---|
| | | <p>4) Pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNBP dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNBP (pengawasan, pengendalian dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha.</p> <p>b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan:</p> <p>Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan; 2) Fasilitasi pembangunan hutan pola agroforestry (Silvopastura maupun Silvofishery); 3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat; 4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan); 5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan sosial. | <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Lembaga</p> <p>Kegiatan</p> | <p>Dinas yang membidangi LHK di 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.</p> <p>Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.</p> |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|----------------|--|---|---|
| | | <p>c. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan:</p> <p>1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan hasil hutan skala kecil/UMKM;</p> <p>2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legabilitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM.</p> | Lembaga | UMKM/Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi |
| | | d. Penyusunan RPHJP dan RPHJpd (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJpd yang sudah disahkan) | Jumlah Dokumen | UMKM/Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi |
| | | e. Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan | Laporan pengamanan hutan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | f. Penyusunan data potensi SDH | Data potensi SDH | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | g. Penataan batas blok dan petak (penataan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan) | Laporan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | h. Monev Pemanfaatan Hutan | Laporan dan rekomendasi tindak lanjut | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | i. Monev Penggunaan kawasan hutan | Laporan dan rekomendasi tindak lanjut | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | j. Penyusunan rencana detil pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak | Rencana bisnis, Desain Tapak | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | k. Pengadaan Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan | Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|--|---|---------------------|--------------------------------|
| | | l. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial | Laporan Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | m. Pembangunan resort | Jumlah resort | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | n. Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan | Laporan Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | o. Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial | Laporan Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | p. Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan | Laporan Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | q. Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional | Laporan Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | r. Fasilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH | Laporan Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| 6. | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran) | Lokasi | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga | Unit/Buku/lembar | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | c. Pembuatan, penyajian dan penyebaran informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya | Unit/Lembar/lokasi | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | d. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu | Unit/Lokasi | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | e. Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api | Kelompok Masyarakat | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) | Lokasi/Kelompok | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|----------------|--|--|--|
| | | g. Pembuatan dan/ atau pengelolaan sekat bakar | Km | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | h. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; 2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi; 3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi; 4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi; 5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi. | Kg/Ton/kelompok masyarakat Kg/Ton/kelompok masyarakat Kg/Ton/kelompok masyarakat Kg/Ton/kelompok masyarakat | 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | i. Pembuatan Sekat Kanal/ Embung/ Kantong Air | Jenis dan Jumlah Usaha Unit | 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | j. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi | Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | k. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla | Unit/Sistem | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | l. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan | Desa | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | m. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya) | Orang | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla 1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla; 2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla; | Unit Unit Unit | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|----------------|--|-----------------|--------------------------------|
| | | 3) Kendaraan/transportasi air; 4) Pompa Jingga; 5) Pompa Induk; 6) Pompa Apung; 7) Selang; 8) Nozzle; 9) Peralatan tangan; 10) Pompa Punggun; 11) Peralatan Pribadi (APD); 12) Perlengkapan Regu. | Unit | |
| | | o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | Posko | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | p. Pelaksanaan Pemadaman Darat | Hari Operasi | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | q. Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan | | |
| | | 1) Pengawasan areal bekas terbakar; | Lokasi/Hektar | |
| | | 2) Inventarisasi luas karhutla; | Lokasi/Hektar | |
| | | 3) Penaksiran kerugian; | Lokasi/Hektar | |
| | | 4) Koordinasi penanganan pasca karhutla. | Kegiatan/lokasi | |
| | | r. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura) | | |
| | | 1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA); | Orang | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | 2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api; | Hektar/Spot | |
| | | 3) Pemadaman Kebakaran Hutan; | Hektar | |
| | | 4) Penyadartahuan Masyarakat; | Desa/Kelompok | |
| | | 5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan. | Unit | |
| | | s. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla | Unit/Sistem | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------------------------|
| | | i. Pendirian posko Karhutla | Posko | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| 7. | Perlindungan dan pengamanan hutan | a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | Hektar | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Hektar | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | c. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | Hektar | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | e. Penjagaan di tempat-tempat tertentu | Lokasi | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | f. Patroli pengamanan | Lokasi | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | g. Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi | | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | 1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi; | Jumlah operasi | |
| | | 2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi illegal. | Jumlah operasi | |
| | | h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi | Kegiatan | Pemerintah |
| | | i. Penyebaran/Pembinaan Polisi Kehutanan | Kegiatan | Polisi Kehutanan |
| | | j. Penyebaran/Pembinaan PPNS | Kegiatan | PPNS |
| | | k. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Apel Siaga Pengamanan Hutan | Kegiatan | Pemerintah |
| | | l. Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut, Senjata Api dan Mobil Patroli) | Polisi Kehutanan | Polisi Kehutanan |
| | | m. Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tabura) | | |
| | | 1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP); | orang | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | 2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut | kegiatan | |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|---------------------------------------|--|---------------|--------------------------------|
| 8. | Pengembangan perbenihan tanaman hutan | <p>(MMP);</p> <p>3) Penyediaan Sarpras Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas) meliputi:</p> <p>1) Pembuatan batas areal sumber benih;</p> <p>2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran dan analisis data dan seleksi);</p> <p>3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging));</p> <p>4) Pemangkasian (pemangkasian cabang, pemangkasian tajuk dan pemangkasian pucuk (<i>top pruning</i>));</p> <p>5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan);</p> <p>6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit; pengamanan dari pencurian kayu, pengembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili dan papan nama; pencegahan dan pengendalian kebakaran); dan/atau</p> <p>7) Pemanfaatan/pengunduhan benih.</p> | unit | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | <p>a.</p> | Hektar | |
| | | <p>b.</p> | | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | <p>1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas;</p> | Hektar | |
| | | <p>2) Pengumpulan benih dari individu/family plus;</p> | Hektar | |
| | | <p>3) Pembuatan rancangan penanaman;</p> | Hektar | |
| | | <p>4) Pembibitan;</p> | Hektar | |
| | | <p>5) Pemananan</p> | Hektar | |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|----------------|---|---|--|
| | | <p>6) Penanaman dan pemeliharaan;</p> <p>7) Evaluasi tegakan;</p> <p>8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging)); dan/atau</p> <p>9) Penetapan sumber benih.</p> | Hektar Hektar Hektar | |
| | | <p>c.</p> <p>Pembuatan/pengadaan bibit:</p> <p>1) Pembangunan persemaian;</p> <p>2) Pengadaan bibit (tender);</p> <p>3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR); dan/atau</p> <p>4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)</p> | Hektar Unit atau Batang Unit atau Batang Unit atau Batang Unit atau Batang | 1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat |
| | | <p>d.</p> <p>Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan, meliputi:</p> <p>1) Sertifikasi sumber benih;</p> <p>2) Sertifikasi mutu benih; dan/atau</p> <p>3) Sertifikasi mutu bibit.</p> | Kali Kali Kali | 1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH |
| | | <p>e.</p> <p>Pembinaan perbenihan tanaman hutan, dapat berupa:</p> <p>1) Bimbingan teknis;</p> <p>2) Pemantauan dan evaluasi;</p> <p>3) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau</p> <p>4) Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan, melalui:</p> <p>a) Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih;</p> <p>b) Pelatihan Penilaian Sumber Benih;</p> <p>c) Pelatihan Pengujian Mutu Benih ;</p> <p>d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit;</p> <p>e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit</p> | Kali atau Orang Kali atau Orang Kali atau Orang Kali atau Orang Kali atau Orang Kali atau Orang Kali atau Orang Kali atau Orang Kali atau Orang | 1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Pelaku Usaha PTH |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|----------------------|--|---|---|
| 9. | Penyuluhan kehutanan | <p>a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan: Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK)</p> <p>b. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan: Fasilitasi Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Posluhutdes)</p> <p>c. Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan: 1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan; 2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan; 3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL; dan/atau 4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan. 5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh</p> <p>d. Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL</p> <p>e. Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH</p> <p>f. Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha: Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluhan</p> <p>f. Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk: 1) Metode penyuluhan: a) Lomba wana lestari; b) Termu teknis KTH; c) Sekolah lapang; dan/atau d) Workshop, dll. 2) Materi Penyuluhan: a) Media cetak (buku, majalah, leaflet, booklet, bulletin, modul, dll); dan/atau</p> | <p>Jumlah Lokasi</p> <p>Jumlah Lokasi</p> <p>Orang</p> <p>Kelompok</p> <p>Unit</p> <p>Jumlah Lokasi</p> | <p>Lokasi UPPK</p> <p>1. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 2. KTH 3. Masyarakat</p> <p>1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3. Masyarakat</p> <p>KTH</p> <p>1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3. Masyarakat</p> <p>1. KTH 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat</p> |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|---------------------------|--|---------------|---|
| | | b) Media elektronik (radio, TV dan online sistem) c) Sekolah Lapang Tematik Unggulan (RHL/HHBK/Perhutanan Sosial/pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan) Penyusunan Program (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi: 1) Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrument <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> , <i>Impact Point</i> , <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya, dan/atau 2) Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) kehutanan. | Dokumen | 1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat |
| | | h. Monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan | Laporan | 1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat |
| | | i. Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot | | 1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat |
| | | j. Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang terdiri atas: 1) Sarana perlengkapan perorangan; 2) Sarana dan prasarana pendukung utama; dan/atau 3) Sarana pendukung lainnya. | Unit | 1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat |
| | | k. Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha | Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat |
| | | l. Pendampingan Kegiatan RHL | Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat |
| 10. | Program strategis lainnya | a. Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi: | | |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|----------------|---|--|--|
| | | 1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau 2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. b. Penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi: 1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; 2) dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; 3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan; 4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan; 5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau 6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan. | (4) Orang Orang UMKM Kegiatan Orang Orang Orang Lokasi Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | c. Pembedaan insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa | | |

RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|--|---|--|--------------------------------|
| 1. | Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya | a. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya 1) Proses pengusulan dan penetapan pembangunan Tahura 2) Perencanaan: a) Penataan Blok Tahura; b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura; c) Kerjasama Pengelolaan Kawasan Tahura; d) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Tahura 3) Pengelolaan: a) Penanganan open area (area terbuka) melalui penanganan konflik tenurial di Kawasan Tahura; b) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura bersama Masyarakat; c) Pengelolaan daerah penyangga Tahura. 4) Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik melalui perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati, Spesies dan Genetik di Tahura, melalui Inventarisasi dan Pemantauan Potensi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik 5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan a) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura; b) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet); c) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura. 6) Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem a) Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem; b) Penanaman bersama Masyarakat; | (4) Unit KK Unit KK Jumlah Perjanjian Kerja Sama Unit KK Hektar unit KK Hektar Dokumen Dokumen Unit Unit KK Hektar Hektar | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|----------------|--|--|--|
| | | <p>c) Pemeliharaan Tanaman bersama Masyarakat; Pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Tahura</p> <p>b.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA); 2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api; 3) Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan; 4) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan; 5) Pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung dan kantong air; 7) Pembuatan sistem peringatan dini karhutla; 8) Pendampingan dan peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat (praktek pembukaan lahan tanpa bakar, pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar; pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; dsb) 9) Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla, penyebarluasan informasi melalui Peta, infografis atau sejenisnya; 10) Penerapan deteksi dini (melalui menara pengawas, kamera/CCTV, penginderaan jauh); 11) Pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi hotspot (Unit); 12) Penetapan posko dalkarhutla dan level kesiagaannya; 13) Pemadaman (pengukuran api atau size up, pembuatan ilaran api udara, penyapuan bara api atau mopping up, dsb); 14) Pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalkarhutla. <p>c.</p> <p>Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Lokasi): | <p>(4)</p> <p>Hektar</p> <p>Orang</p> <p>kegiatan</p> <p>kegiatan</p> <p>Desa/kelompok</p> <p>unit</p> <p>unit</p> <p>kegiatan</p> <p>kegiatan</p> <p>kegiatan</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Hektar</p> <p>Unit</p> | <p>(5)</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat</p> |

| No. | Program | Kegiatan | Output | Penerima Manfaat |
|-----|---|---|----------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> a) Penghitungan luas areal terbakar b) Analisa dampak dan penaksiran kerugian c) Detasering terhadap areal pasca karhutla | Hektar | |
| | | 2) Pemulihan ekosistem areal bekas terbakar yang melibatkan masyarakat | Dokumen | |
| | | | Hektar | |
| | | 3) Penanganan Kasus: | | |
| | | a) Koordinasi dalam rangka investigasi dan penyidikan penyebab kejadian karhutla | Kali | |
| | | b) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum (bila perlu) | Kali | |
| 2. | Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/ Penyuluhan/Pameran) | Lokasi | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga | Unit/Buku/ | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | c. Pembuatan, penyajian dan penyebaran informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya | Unit/Lembar/ | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | d. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu | Unit/Lokasi | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | e. Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api | Kelompok | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) | Lokasi/ | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | g. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar | Km | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | h. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan kewenangannya: | Kg/Ton/kelompok masyarakat | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | 1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; | Kg/Ton/kelompok masyarakat | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | 2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi; | Kg/Ton/kelompok masyarakat | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) |
|------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | 3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi; | Kg/Ton/kelompok masyarakat | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | 4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi; | Jenis dan Jumlah Usaha | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | 5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi. | Jenis dan Jumlah Usaha | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | i. | Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air | Unit | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | j. | Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi | Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | k. | Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla | Unit/Sistem | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | l. | Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan | Desa | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | m. | Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya) | Orang | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | n. | Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla | | Pemerintah |
| | | 1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla; | Unit | Pemerintah |
| | | 2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla; | Unit | Pemerintah |
| | | 3) Kendaraan/transporasi air; | Unit | Pemerintah |
| | | 4) Pompa Jingga; | Unit | Pemerintah |
| | | 5) Pompa Induk; | Unit | Pemerintah |
| | | 6) Pompa Apung; | Unit | Pemerintah |
| | | 7) Selang; | Unit | Pemerintah |
| | | 8) Nozzle; | Unit | Pemerintah |
| | | 9) Peralatan tangan; | Unit | Pemerintah |
| | | 10) Pompa Punggun; | Unit | Pemerintah |

| No. | Program | Kegiatan | Output | Penerima Manfaat |
|-----|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | 1) Peralatan Pribadi (APD); 1.2) Perlengkapan Regu; | Unit | Pemerintah |
| | | o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | Posko | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | p. Pelaksanaan Pemadaman Darat | Hari Operasi | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | q. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla | Unit/Sistem | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | r. Pendirian posko Karhutla | Posko | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| 3. | Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya | Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan: a. Pengawasan areal bekas terbakar b. Inventarisasi luas karhutla c. Penaksiran kerugian d. Koordinasi penanganan pasca karhutla | Kegiatan/Lokasi/Hektar Lokasi/Hektar Lokasi/Hektar Kegiatan/Lokasi | Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah |
| 4. | Penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air | a. Pembibitan b. Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis c. Penanaman pada kawasan perlindungan setempat d. Penanaman rehabilitasi DAS dalam dan luar kawasan berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK e. Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) | Batang Hektar Hektar Hektar Unit | 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| 5. | Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | a. Perencanaan RTH b. Pengadaan lahan RTH | Dokumen/Rekomendasi Luas lahan/Hektar | 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat |

| No. | Program | Kegiatan | Output | Penerima Manfaat |
|-----|--|--|---|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6. | Penyuluhan Lingkungan Hidup | c. Perancangan teknik RTH | Dokumen/ Rekomendasi | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | d. Pelaksanaan pembangunan RTH | Luas lahan /Hektar | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | e. Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH | Luas lahan /Hektar | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Persentase | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| 7. | Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya | c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah masyarakat/keompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | d. Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan | Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial: | | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | a. Patroli Pengamanan bersama Masyarakat | Unit KEE | |
| | | b. Penyediaan Sarpras Pengelolaan | | |
| 8. | Pengelolaan keanekaragaman hayati | c. Pendidikan/ Penelitian dan Penyelektahuan | | |
| | | d. Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati | | |
| | | e. Pemulihan Ekosistem/ Pembinaan Habitat | | |
| | | a. Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik | Dokumen | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | b. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik | Dokumen | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | c. Pengembangan Sistem Database Kehati, Spesies dan Genetik (Balai Kliring) | Unit | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |

| No. (1) | Program (2) | Kegiatan (3) | Output (4) | Penerima Manfaat (5) | |
|------------|--|--|--|---|--|
| 9. | Program strategis lainnya | d | Pencadangan sumber daya alam hayati melalui pengelolaan Taman Kehati melalui penanaman Pohon Langka sesuai Ekoregion dan Ruang Terbuka Hijau (Jenis) | Jenis 1. Pemerintah 2. Masyarakat | |
| | | e. | Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi | Unit 1. Pemerintah 2. Masyarakat | |
| | | a. | Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi: 1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau | Orang 1. Pemerintah 2. Masyarakat | |
| | | | 2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. | | |
| | | b. | penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi: 1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; 2) dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; 3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan; | UMKM Kegiatan Orang | 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | | | 4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan; | Orang | 1. Pemerintah 2. Masyarakat |
| | 5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau 6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan. | Orang Lokasi | 1. Pemerintah 2. Masyarakat | | |
| | c. | pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa | Kegiatan | 1. Pemerintah 2. Masyarakat | |

B. Format RKP DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/ Kota

FORMAT RKP DBH DR PROVINSI
RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

PROVINSI:
PAGU DBH DR:

| No. | Program/ Kegiatan | Anggaran | | Output | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang | | |
|-----|---|----------|-----------|--------|---------|-----------|--------------------|----------------------------|--------|------|
| | | Rencana | Realisasi | % | Rencana | Realisasi | | | Satuan | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangannya DBH Kehutanan, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi: | | | | | | | | | |
| | a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL). Rencana Pembangunan Hutan Kota | | | | | | Dokumen | | | |
| | b. Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya | | | | | | Dokumen | | | |
| | c. Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan: | | | | | | | | | |
| | 1) Pembangunan Hutan Hak; | | | | | | Ha | | | |
| | 2) Penghijauan lingkungan; | | | | | | Ha | | | |
| | 3) Pembangunan Hutan kota; | | | | | | Ha | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (11) |
| | 4) Penerapan teknik konservasi tanah dan air termasuk pada ekosistem mangrove dan gambut. | | | | | | Ha | | |
| | d. Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | | | Kegiatan | | |
| | e. Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 26 Tahun 2020 | | | | | | Ha | | |
| 2. | Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangannya | | | | | | | | |
| | a. Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya | | | | | | | | |
| | 1) penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah bertindak sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) | | | | | | Ha | | |
| | 2) budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU No. 23 tentang Pemerintah Daerah); | | | | | | Ha | | |
| | 3) Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2) | | | | | | Ha | | |
| | b. Rehabilitasi hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi: | | | | | | | | |
| | 1) Penanaman mangrove dan hutan pantai diluar kawasan | | | | | | Ha | | |
| | 2) Penanaman oleh pemegang izin Perhutanan Sosial sesuai rencana kegiatan Perhutanan Sosial. | | | | | | Ha | | |
| | c. Rehabilitasi lahan dan taman Hutan raya yang terdiri atas: | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------|-----------|-----|---------|-----------|----------------------|-----|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana | Realisasi | % | Rencana | Realisasi | Satuan | % | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | 1) Penghijauan; | | | | | | Ha | | | |
| | 2) Reboisasi; | | | | | | Ha | | | |
| | 3) Pemeliharaan tanaman; | | | | | | Ha | | | |
| | 4) Pengayaan tanaman; | | | | | | Ha | | | |
| | 5) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis; | | | | | | Ha | | | |
| | 6) Penanaman pohon kanan kiri sungai; dan | | | | | | Ha | | | |
| | 7) Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan. | | | | | | Ha | | | |
| 3. | Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan | | | | | | | | | |
| | a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Tahura) | | | | | | | | | |
| | 1) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura | | | | | | Dokumen | | | |
| | 2) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet) | | | | | | Unit | | | |
| | 3) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura | | | | | | Unit KK | | | |
| | b. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu | | | | | | Dokumen/Reko mendasi | | | |
| | c. Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu | | | | | | Dokumen/Reko mendasi | | | |
| | d. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK) melalui Sistem Pelayanan Pertizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | - | Jumlah izin | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | | (11) |
| e. | Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan | | | | | | Jumlah pemanfaatan | | | |
| f. | Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati | | | | | | Lokasi | | | |
| g. | Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerimaan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | Jumlah izin | | | |
| h. | Pembudayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | | | Lokasi | | | |
| i. | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu | | | | | | Dokumen/Rekomendasi | | | |
| j. | Pembudayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya | | | | | | Unit | | | |
| k. | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian | | | | | | Laporan | | | |
| l. | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun | | | | | | Dokumen | | | |
| m. | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun | | | | | | Laporan | | | |
| n. | Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHBK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | Dokumen | | | |
| o. | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Species dan Genetik | | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) | (11) |
| | 1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk Appendix CITES melalui pengawasan, patroli dan sosialisasi | | | | | | Entitas | | | |
| | 2) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/KPA melalui invent potensi kehati spesies dan genetic | | | | | | Hektar | | | |
| | 3) Penyusunan Profil Kehati, Species dan Genetik Daerah Provinsi | | | | | | Dokumen | | | |
| | 4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi | | | | | | Dokumen | | | |
| | 5) Pengembangan sistem data base kehati daerah provinsi (Balai Kliring) | | | | | | Unit | | | |
| | 6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati | | | | | | Sistem | | | |
| | 7) Pembinaan dan edukasi kepada Kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan dan kawasan Konservasi | | | | | | Lokasi | | | |
| | 8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial: | | | | | | Unit KEE | | | |
| | a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat | | | | | | | | | |
| | b) Penyediaan Sarpras Pengelolaan | | | | | | | | | |
| | c) Pendidikan/ Penelitian dan Penyadartahuan | | | | | | | | | |
| | d) Inventarisasi/ Monitoring Potensi Kehati | | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|---|-------------|---------------|-------|-------------|--|------------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (11) |
| 4. | e) Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat Masyarakat dan Perhutanan Sosial | | | | | | | | |
| a. | Fasilitasi penyediaan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKM Pengelolaan HTR, Kemitraan Kebutanan dan Hutan Adat 1) Operasional POKJA PPS 2) Sosialisasi tingkat tapak 3) Fasilitasi Usulan Izin PS 4) Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat 5) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/atau 6) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan local | | | | | Jumlah Lokasi | | | |
| b. | Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 1) Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial 2) Pelatihan pengembangan usaha/kerjasama usaha 3) Pelatihan pengembangan kewirausahaan 4) Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial | | | | | Jumlah Lokasi Jumlah Calon Lokasi PS Jumlah Lokasi Konflik Jumlah Komunitas MHA Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah KUPS Jumlah KUPS Jumlah KUPS | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) | (11) |
| | 5) Pembangunan agroforestry | | | | | | Jumlah KUPS | | | |
| | 6) Pemberian bantuan alat ekonomi produktif | | | | | | Paket | | | |
| | 7) Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial | | | | | | | | | |
| | a) Sarpras pendukung pelaksanaan pendampingan | | | | | | Unit | | | |
| | b) Operasional Pendamping | | | | | | Jumlah Pendamping | | | |
| | 8) Pengawasan dan Pengendalian PS | | | | | | | | | |
| | a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok PS | | | | | | Kegiatan | | | |
| | b) Sarpras pendukung pelaksanaan Money | | | | | | Unit | | | |
| | c. Pemberian Akses Kelola Masyarakat melalui Kemitraan Konservasi (Hektar) | | | | | | | | | |
| | 1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Kemitraan Konservasi | | | | | | Hektar | | | |
| | 2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaan | | | | | | Desa/Kelompok | | | |
| | 3) Perjanjian Kerja Sama | | | | | | Perjanjian | | | |
| | 4) Pelatihan Masyarakat | | | | | | Kelompok | | | |
| | d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Konservasi | | | | | | | | | |
| | 1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa | | | | | | Desa/Kelompok | | | |
| | 2) Pembentukan Kelembagaan | | | | | | Kelompok | | | |
| | 3) Pelatihan Masyarakat | | | | | | Kelompok | | | |
| | 4) Pemberian Bantuan Usaha | | | | | | Unit | | | |
| 5. | Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | |
| | a. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) | (11) |
| | 1) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan perlindungan hutan: a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin (diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut) secara partisipatif. b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan melalui penguatan Resort Based Management (RBM). | | | | | | Lokasi | | | |
| | 2) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery): a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan Hutsos. b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Masyarakat di Wilayah KPH. c) Fasilitasi Pendampingan Penanganan Pascapanen dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH | | | | | | Lembaga | | | |
| | | | | | | | Kegiatan | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) | (11) |
| | 3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH | | | | | | | | | |
| | a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM | | | | | | Orang | | | |
| | b) Operasional KPH | | | | | | Bulan | | | |
| | 4) Pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNBPP dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNBPP (pengawasan, pengendalian dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha. | | | | | | Kegiatan | | | |
| | b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan: | | | | | | | | | |
| | Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multisaha kehutanan: | | | | | | | | | |
| | 1) Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. | | | | | | Kegiatan | | | |
| | 2) Fasilitasi pembangunan hutan pola agroforestry (Sylvopastura maupun Silvofishery). | | | | | | Kegiatan | | | |
| | 3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. | | | | | | Kegiatan | | | |
| | 4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan). | | | | | | Lembaga | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) | (11) |
| | 5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan sosial. | | | | | | Kegiatan | | | |
| c. | Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan: 1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan hasil hutan skala kecil/UMKM. 2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM. | | | | | | Lembaga | | | |
| d. | Penyusunan RPHJP dan RPHJPD (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJPD yang sudah disahkan) | | | | | | Jumlah Dokumen | | | |
| e. | Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan | | | | | | Laporan pengamanan hutan | | | |
| f. | Penyusunan data potensi SDH | | | | | | Data potensi SDH | | | |
| g. | Penataan batas blok dan petak (penataan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan) | | | | | | Laporan | | | |
| h. | Monev Pemanfaatan Hutan | | | | | | Laporan dan rekomendasi tindak lanjut | | | |
| i. | Monev Penggunaan kawasan hutan | | | | | | Laporan dan rekomendasi tindak lanjut | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | Output | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | (11) |
| j. | Penyusunan rencana detail pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak | | | | | | Rencana bisnis, Desain Tapak | |
| k. | Pengadaan Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan | | | | | | Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan | |
| l. | Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang FPBH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial | | | | | | Laporan Kegiatan | |
| m. | Pembangunan resort | | | | | | Jumlah resort | |
| n. | Facilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan | | | | | | Laporan Kegiatan | |
| o. | Facilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial | | | | | | Laporan Kegiatan | |
| p. | Facilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan | | | | | | Laporan Kegiatan | |
| q. | Facilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional | | | | | | Laporan Kegiatan | |
| r. | Facilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH | | | | | | Laporan Kegiatan | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | | (11) |
| 6. | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | |
| a. | Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran) | | | | | | Lokasi | | | |
| b. | Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga | | | | | | Unit/Buku/lembar | | | |
| c. | Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenitannya | | | | | | Unit/Lembar/lo kasi | | | |
| d. | Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu | | | | | | Unit/Lokasi | | | |
| e. | Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api | | | | | | Kelompok Masyarakat | | | |
| f. | Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) | | | | | | Lokasi/Kelompok | | | |
| g. | Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar | | | | | | Km | | | |
| h. | Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan | | | | | | Kg/Ton/kelompok masyarakat | | | |
| | 1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi | | | | | | Kg/Ton/kelompok masyarakat | | | |
| | 2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi | | | | | | Kg/Ton/kelompok masyarakat | | | |
| | 3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi | | | | | | Kg/Ton/kelompok masyarakat | | | |
| | 4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi | | | | | | Jenis dan Jumlah Usaha | | | |
| | 5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi | | | | | | Jenis dan Jumlah Usaha | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (11) |
| i. | Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air | | | | | | Unit | | |
| j. | Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi | | | | | | Kegiatan | | |
| k. | Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla | | | | | | Unit/Sistem | | |
| l. | Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan | | | | | | Desa | | |
| m. | Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya) | | | | | | Orang | | |
| n. | Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla | | | | | | Unit | | |
| | 1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla | | | | | | Unit | | |
| | 2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla | | | | | | Unit | | |
| | 3) Kendaraan/transportasi air | | | | | | Unit | | |
| | 4) Pompa jingjing | | | | | | Unit | | |
| | 5) Pompa Induk | | | | | | Unit | | |
| | 6) Pompa Apung | | | | | | Unit | | |
| | 7) Selang | | | | | | Unit | | |
| | 8) Nozzle | | | | | | Unit | | |
| | 9) Peralatan tangan | | | | | | Unit | | |
| | 10) Pompa Punggang | | | | | | Unit | | |
| | 11) Peralatan Pribadi (APD) | | | | | | Unit | | |
| | 12) Pertengkapan Regu | | | | | | Unit | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) | (11) |
| | o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | Posko | | | |
| | p. Pelaksanaan Pemadsman Darat | | | | | | Hari Operasi | | | |
| | q. Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan | | | | | | | | | |
| | 1) Pengawasan areal bekas terbakar | | | | | | Lokasi/Hektar | | | |
| | 2) Inventarisasi luas karhutla | | | | | | Lokasi/Hektar | | | |
| | 3) Penaksiran kerugian | | | | | | Lokasi/Hektar | | | |
| | 4) Koordinasi penanganan pasca karhutla | | | | | | Kegiatan/lokasi | | | |
| | r. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura) | | | | | | | | | |
| | 1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) | | | | | | Orang | | | |
| | 2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api | | | | | | Hektar/Spot | | | |
| | 3) Pemadaman Kebakaran Hutan | | | | | | Hektar | | | |
| | 4) Penyadartahuan Masyarakat | | | | | | Desa/Kelompok | | | |
| | 5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | Unit | | | |
| | s. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla | | | | | | Unit/Sistem | | | |
| | t. Pendirian posko Karhutla | | | | | | Posko | | | |
| 7. | Perindungan dan pengamanan hutan | | | | | | | | | |
| | a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | Hektar | | | |
| | b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | | | | | | Hektar | | | |
| | c. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | | | | | | Hektar | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) | (11) |
| d. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | | | Kegiatan | | | |
| e. | Penjagaan di tempat-tempat tertentu | | | | | | Lokasi | | | |
| f. | Patroli pengamanan | | | | | | Lokasi | | | |
| g. | Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi | | | | | | | | | |
| | 1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi | | | | | | Jumlah operasi | | | |
| | 2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi ilegal. | | | | | | Jumlah operasi | | | |
| h. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi | | | | | | Kegiatan | | | |
| i. | Penyegaran/Pembinaan Polisi Kehutanan | | | | | | Kegiatan | | | |
| j. | Penyegaran/Pembinaan PPNS | | | | | | Kegiatan | | | |
| k. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Apel Siaga Pengamanan Hutan | | | | | | Kegiatan | | | |
| l. | Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut, Senjata Api dan Mobil Patroli) | | | | | | Polisi Kehutanan | | | |
| m. | Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura) | | | | | | | | | |
| | 1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) | | | | | | orang | | | |
| | 2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) | | | | | | kegiatan | | | |
| | 3) Penyediaan Sarpras Perlindungan dan Pengamanan Hutan | | | | | | unit | | | |
| 8. | Pengembangan perbenihan tanaman hutan | | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | | |
| (1) | (2) a. Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas) meliputi: 1) Pembuatan batas areal sumber benih; 2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran dan analisis data dan seleksi); 3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging)); 4) Pemanjangan (pemanjangan cabang, pemanjangan tajuk dan pemanjangan pucuk (<i>top pruning</i>)) 5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan); 6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit; pengamanan dari pencurian kayu, pengembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili dan papan nama; pencegahan dan pengendalian kebakaran); dan/atau 7) Pemanfaatan/pengunduhan benih. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Hektar | | (11) |
| | b. Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas, melalui: | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | | |
| | 1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas; | | | | | | Hektar | | | (11) |
| | 2) Pengumpulan benih dari individu/family plus; | | | | | | Hektar | | | |
| | 3) Pembuatan rancangan penanaman; | | | | | | Hektar | | | |
| | 4) Pembibitan; | | | | | | Hektar | | | |
| | 5) Pemamanan | | | | | | Hektar | | | |
| | 6) Penanaman dan pemeliharaan; | | | | | | Hektar | | | |
| | 7) Evaluasi tegakan; | | | | | | Hektar | | | |
| | 8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging) ; dan/atau | | | | | | Hektar | | | |
| | 9) Penetapan sumber benih. | | | | | | Hektar | | | |
| | Pembuatan/pengadaan bibit: | | | | | | | | | |
| | 1) Pembangunan persemaian; | | | | | | Unit atau Batang | | | |
| | 2) Pengadaan bibit (tender); | | | | | | Unit atau Batang | | | |
| | 3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR); dan/atau | | | | | | Unit atau Batang | | | |
| | 4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | | | | | | Unit atau Batang | | | |
| | Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan, meliputi: | | | | | | | | | |
| | 1) Sertifikasi sumber benih; | | | | | | Kali | | | |
| | 2) Sertifikasi mutu benih; dan/atau | | | | | | Kali | | | |
| | 3) Sertifikasi mutu bibit. | | | | | | Kali | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) | (11) |
| e. | Pembinaan perbenihan tanaman hutan, dapat berupa: 1) Bimbingan teknis; 2) Pemantauan dan evaluasi; 3) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau 4) Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan, melalui: a) Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih; b) Pelatihan Penilaian Sumber Benih; c) Pelatihan Pengujian Mutu Benih ; d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit; e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit | | | | | | | | | |
| 9. | Penyuluhan kehutanan | | | | | | | | | |
| a. | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan: Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) | | | | | | | Jumlah Lokasi | | |
| b. | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan: Fasilitas Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Postuhutdes) | | | | | | | Jumlah Lokasi | | |
| c. | Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan: 1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan; 2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan; | | | | | | | Orang | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | | (11) |
| | 3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL; dan/atau | | | | | | | | | |
| | 4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan. | | | | | | | | | |
| | 5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh | | | | | | | | | |
| d. | Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL | | | | | | Kelompok | | | |
| e. | Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH | | | | | | | | | |
| f. | Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluh | | | | | | Unit | | | |
| g. | Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk: | | | | | | | | | |
| | 1) Metode penyuluhan: | | | | | | | | | |
| | a) Lomba warna lestari; | | | | | | | | | |
| | b) Termu teknis KTH; | | | | | | | | | |
| | c) Sekolah lapang; dan/atau | | | | | | | | | |
| | d) Workshop, dll. | | | | | | | | | |
| | 2) Materi Penyuluhan: | | | | | | Jumlah Lokasi | | | |
| | a) Media cetak (buku, majalah, leaflet, booklet, bulletin, modul, dll); dan/atau | | | | | | | | | |
| | b) Media elektronik (radio, TV dan online sistem) | | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) | (11) |
| | c) Sekolah Lapang Tematik Unggulan (RHL/HHBK/Perhutanan Sosial/pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan) Penyusunan Program (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi: 1) Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrument <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> , <i>Impact Point</i> , <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya, dan/atau 2) Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) kehutanan. | | | | | | Dokumen | | | |
| | h. | | | | | | | | | |
| | i. | | | | | | | Dokumen | | |
| | j. | | | | | | | Laporan | | |
| | k. | | | | | | | | | |
| | l. | | | | | | | Unit | | |
| | m. | | | | | | | Kegiatan | | |
| 10. | Program strategis lainnya | | | | | | | Kegiatan | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) a. Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi: 1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau 2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. b. Penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi: 1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; 2) dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; 3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan; 4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan; 5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau 6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------|-----------|-----|---------|-----------|----------|-----|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana | Realisasi | % | Rencana | Realisasi | Satuan | % | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| c. | Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa. | | | | | | Kegiatan | | | |

FORMAT RKP SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA
 RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

KABUPATEN/KOTA:
 PAGU SISA DBH DR:

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang | |
|-----|--|----------|-----------|-----|---------|-----------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| | | Rencana | Realisasi | % | Rencana | Realisasi | Satuan | | | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya | | | | | | | | | |
| a. | Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya | | | | | | | | | |
| | 1) Proses pengusulan dan penetapan pembangunan Tahura | | | | | | | | | |
| | 2) Perencanaan: | | | | | | | | | |
| | a) Penataan Blok Tahura | | | | | | Unit KK | | | |
| | b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura | | | | | | Unit KK | | | |
| | c) Kerjasama Pengelolaan Kawasan Tahura | | | | | | Jumlah Perjanjian Kerja Sama | | | |
| | d) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Tahura | | | | | | Unit KK | | | |
| | 3) Pengelolaan: | | | | | | | | | |
| | a) Penanganan open area (area terbuka) melalui penanganan konflik tenurial di Kawasan Tahura | | | | | | Hektar | | | |
| | b) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura bersama Masyarakat | | | | | | unit KK | | | |
| | c) Pengelolaan daerah penyangga Tahura | | | | | | Hektar | | | |

| No. (1) | Program/Kegiatan (2) | Anggaran | | | Output | | | Metode Pelaksanaan (10) | Besaran Kegiatan Penunjang (11) |
|------------|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | | |
| | 4) Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik melalui perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati, Spesies dan Genetik di Tahura, melalui Inventarisasi dan Pemantauan Potensi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik | | | | | | Dokumen | | |
| | 5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan | | | | | | | | |
| | a) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura | | | | | | Dokumen | | |
| | b) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet) | | | | | | Unit | | |
| | c) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura | | | | | | Unit KK | | |
| | 6) Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem | | | | | | | | |
| | a) Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem | | | | | | Hektar | | |
| | b) Penanaman bersama Masyarakat | | | | | | Hektar | | |
| | c) Pemeliharaan Tanaman bersama Masyarakat | | | | | | Hektar | | |
| | b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Tahura | | | | | | | | |
| | 1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) | | | | | | Orang | | |
| | 2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api | | | | | | kegiatan | | |
| | 3) Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan | | | | | | kegiatan | | |
| | 4) Penyadartahuan Masyarakat | | | | | | Desa/kelompok | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|---|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) | (11) |
| | 5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | unit | | | |
| | 6) Pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung dan kantong air | | | | | | unit | | | |
| | 7) Pembuatan sistem peringatan dini karhutla | | | | | | kegiatan | | | |
| | 8) Pendampingan dan peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat (praktek pembukaan lahan tanpa bakar; pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar; pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; dsb) | | | | | | kegiatan | | | |
| | 9) Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla, penyebarluasan informasi melalui Peta, infografis atau sejenisnya | | | | | | kegiatan | | | |
| | 10) Penerapan deteksi dini (melalui menara pengawas, kamera/CCTV, penginderaan jauh) | | | | | | Unit | | | |
| | 11) Pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi hotspot (Unit) | | | | | | Unit | | | |
| | 12) Penetapan posko dalkarhutla dan level kesagaannya; | | | | | | Unit | | | |
| | 13) Pemadaman (pengukuran api atau size up, pembuatan ilaran api udara, penyapuan bara api atau mopping up, dsb) | | | | | | Hektar | | | |
| | 14) pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalkarhutla. | | | | | | Unit | | | |
| c. | Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya | | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------|-----------|-----|---------|-----------|-------------|-----|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana | Realisasi | % | Rencana | Realisasi | Satuan | % | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | 1) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Lokasi): | | | | | | | | | |
| | a) Penghitungan luas areal terbakar | | | | | | Hektar | | | |
| | b) Analisa dampak dan penaksiran kerugian | | | | | | Dokumen | | | |
| | c) Detasering terhadap areal pasca karhutla | | | | | | Hektar | | | |
| | 2) Pemulihan ekosistem areal bekas terbakar yang melibatkan masyarakat | | | | | | Hektar | | | |
| | 3) Penanganan Kasus: | | | | | | | | | |
| | a) Koordinasi dalam rangka investigasi dan penyidikan penyebab kejadian karhutla | | | | | | Kali | | | |
| | b) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum (bila perlu) | | | | | | Kali | | | |
| 2. | Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | | | | | | | | | |
| | a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran) | | | | | | Lokasi | | | |
| | b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga | | | | | | Unit/Buku | | | |
| | c. Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya | | | | | | Unit/Lembar | | | |
| | d. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu | | | | | | Unit/Lokasi | | | |
| | e. Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api | | | | | | Kelompok | | | |
| | f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) | | | | | | Lokasi | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang | |
|-----|--|----------|-----------|-----|---------|-----------|--|--------------------|----------------------------|------|
| | | Rencana | Realisasi | % | Rencana | Realisasi | Satuan | | | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| g. | Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar | | | | | | Km | | | |
| h. | Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan kewenangannya: 1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi 2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi 3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi 4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi 5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi | | | | | | Kg/Ton/keompok masyarakat Kg/Ton/keompok masyarakat Kg/Ton/keompok masyarakat Kg/Ton/keompok masyarakat Jenis dan Jumlah Usaha Jenis dan Jumlah Usaha | | | |
| i. | Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air | | | | | | Unit | | | |
| j. | Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantauan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi | | | | | | Kegiatan | | | |
| k. | Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla | | | | | | Unit/Sistem | | | |
| l. | Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan | | | | | | Desa | | | |
| m. | Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan | | | | | | Orang | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang | |
|-----|---|----------|-----------|-----|---------|-----------|------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| | | Rencana | Realisasi | % | Rencana | Realisasi | % | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | lainnya) | | | | | | | | | |
| n. | Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla | | | | | | | | | |
| | 1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla | | | | | | Unit | | | |
| | 2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla | | | | | | Unit | | | |
| | 3) Kendaraan/transportasi air | | | | | | Unit | | | |
| | 4) Pompa jingling | | | | | | Unit | | | |
| | 5) Pompa induk | | | | | | Unit | | | |
| | 6) Pompa Apung | | | | | | Unit | | | |
| | 7) Selang | | | | | | Unit | | | |
| | 8) Nozzle | | | | | | Unit | | | |
| | 9) Peralatan tangan | | | | | | Unit | | | |
| | 10) Pompa Punggung | | | | | | Unit | | | |
| | 11) Peralatan Pribadi (APD) | | | | | | Unit | | | |
| | 12) Perlengkapan Regu | | | | | | Unit | | | |
| o. | Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | Posko | | | |
| p. | Pelaksanaan Pemadaman Darat | | | | | | Hari Operasi | | | |
| q. | Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla | | | | | | Unit/Sistem | | | |
| r. | Pendirian posko Karhutla | | | | | | Posko | | | |
| 3. | Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan | | | | | | Kegiatan/Lokasi/Hektar | | | |
| a. | Pengawasan areal bekas terbakar | | | | | | Lokasi/Hektar | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (11) |
| | b. Inventarisasi luas karhutla | | | | | | | | |
| | c. Penaksiran kerugian | | | | | | | | |
| | d. Koordinasi penanganan pasca karhutla | | | | | | | | |
| 4. | Penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air | | | | | | | | |
| | a. Pembibitan | | | | | | Batang | | |
| | b. Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis | | | | | | Hektar | | |
| | c. Penanaman pada kawasan perlindungan setempat | | | | | | Hektar | | |
| | d. Penanaman rehabilitasi DAS dalam dan luar kawasan berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK | | | | | | Hektar | | |
| | e. Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) | | | | | | Unit | | |
| 5. | Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | |
| | a. Perencanaan RTH | | | | | | Dokumen/Rekomendasi | | |
| | b. Pengadaan lahan RTH | | | | | | Luas lahan/Hektar | | |
| | c. Perancangan teknik RTH | | | | | | Dokumen/Rekomendasi | | |
| | d. Pelaksanaan pembangunan RTH | | | | | | Luas lahan/Hektar | | |
| | e. Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH | | | | | | Luas lahan/Hektar | | |
| 6. | Penyuluhan Lingkungan Hidup | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|---|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|-------|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) | (11) |
| a. | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | Persentase | | | |
| b. | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | Kegiatan | | | |
| c. | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | jumlah masyarakat/kelemb pok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat | | | |
| d. | Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan | | | | | | Kegiatan | | | |
| 7. | Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial: | | | | | | | | | |
| a. | Patrol Pengamanan bersama Masyarakat | | | | | | Unit KEE | | | |
| b. | Penyediaan Sarpras Pengelolaan | | | | | | | | | |
| c. | Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan | | | | | | | | | |
| d. | Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati | | | | | | | | | |
| e. | Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat | | | | | | | | | |
| 8. | Pengelolaan keanekaragaman hayati | | | | | | | | | |
| a. | Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik | | | | | | Dokumen | | | |
| b. | Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik | | | | | | Dokumen | | | |
| c. | Pengembangan Sistem Database Kehati, Spesies dan Genetik (Balai Kliring) | | | | | | Unit | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Metode Pelaksanaan | Besaran Kegiatan Penunjang |
|-----|--|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|--------------------|----------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (11) |
| d | Pencadangan sumber daya alam hayati melalui pengelolaan Taman Kehati melalui penanaman Pohon Langka sesuai Ekoregion dan Ruang Terbuka Hijau (Jenis) | | | | | | Jenis | | |
| e. | Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi | | | | | | Unit | | |
| 9. | Program strategis lainnya | | | | | | | | |
| a. | Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi: 1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau 2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. | | | | | | Orang Orang | | |
| b. | penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi: 1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; 2) dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; 3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan; 4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan; 5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; | | | | | | UMKM Kegiatan Orang Orang Orang | | |

| No. (1) | Program/Kegiatan (2) | Anggaran | | | Output | | | Metode Pelaksanaan (10) | Besaran Kegiatan Penunjang (11) |
|------------|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | | |
| | dan/atau | | | | | | | | |
| | 6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan. | | | | | | | | |
| | c. pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa. | | | | | | Lokasi | | |
| | | | | | | | Daerah/Desa | | |

C. Pedoman Penyusunan Rancangan Teknis

PEDOMAN PENYUSUNAN
RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN PROVINSI

Mekanisme penyusunan, penilaian, dan pengesahan rancangan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sebagai berikut:

- a. dibentuk tim penyusunan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan, dengan anggota tim dapat terdiri dari unsur Perangkat Daerah pelaksana, KPH, unit pelaksana teknis KLHK yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat dan instansi lain yang terkait.
- b. Penilai adalah pejabat eselon III yang membidangi RHL pada Perangkat Daerah pelaksana atau pejabat eselon IV yang menangani perencanaan pada unit pelaksana teknis KLHK yang membidangi kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat atau pejabat yang menangani perencanaan di KPH/Tahura.
- c. Pengesahan dilaksanakan oleh Kepala OPD pelaksana kegiatan/Kepala KPH/Kepala Tahura.

PEDOMAN PENYUSUNAN

RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN KABUPATEN/KOTA

Mekanisme penyusunan, penilaian, dan pengesahan rancangan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sebagai berikut:

- a. dibentuk tim penyusunan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan, dengan anggota tim dapat terdiri dari unsur Perangkat Daerah pelaksana, unit pelaksana teknis KLHK yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat dan instansi lain yang terkait.
- b. Penilai adalah pejabat eselon III yang membidangi kegiatan.
- c. Pengesahan dilaksanakan oleh Kepala OPD pelaksana kegiatan/Kepala Tahura.

D. Format Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota
 FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH DR

TAHUN ANGGARAN

PROVINSI:
 SEMESTER:
 PAGU DBH DR:

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang | | |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|----------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | | Satuan (8) | % (9) |
| (1) | (2) | | | | | | | | |
| 1. | Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangannya DBH Kehutanan, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi: a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL). Rencana Pembangunan Hutan Kota b. Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya | | | | | | | | (10) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen | | |
| | | | | | | | Dokumen | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | c. Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan: 1) Pembangunan Hutan Hak; 2) Penghijauan lingkungan; 3) Pembangunan Hutan kota; 4) Penerapan teknik konservasi tanah dan air termasuk pada ekosistem mangrove dan gambut. | | | | | | | |
| | d. Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | | | Ha | |
| | e. Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 26 Tahun 2020 | | | | | | Ha | |
| 2. | Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangannya | | | | | | Kegiatan | |
| | a. Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya 1) penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah berindak sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 2) budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU No. 23 tentang Pemerintah Daerah); 3) Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2) | | | | | | Ha | |
| | b. Rehabilitasi hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi: | | | | | | Ha | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|----------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) |
| | 1) Penanaman mangrove dan hutan pantai diluar kawasan | | | | | | Ha | | |
| | 2) Penanaman oleh pemegang izin Perhutanan Sosial sesuai rencana kegiatan Perhutanan Sosial. | | | | | | Ha | | |
| | c. Rehabilitasi lahan dan taman Hutan raya yang terdiri atas: | | | | | | | | |
| | 1) Penghijauan; | | | | | | Ha | | |
| | 2) Reboisasi; | | | | | | Ha | | |
| | 3) Pemeliharaan tanaman; | | | | | | Ha | | |
| | 4) Pengayaan tanaman; | | | | | | Ha | | |
| | 5) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis; | | | | | | Ha | | |
| | 6) Penanaman pohon kanan kiri sungai; dan | | | | | | Ha | | |
| | 7) Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan. | | | | | | Ha | | |
| 3. | Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan | | | | | | | | |
| | a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Tahura) | | | | | | | | |
| | 1) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura | | | | | | Dokumen | | |
| | 2) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet) | | | | | | Unit | | |
| | 3) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura | | | | | | Unit KK | | |
| | b. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu | | | | | | Dokumen/ Rekomendasi | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------------------|----------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) |
| c. | Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu | | | | | | Dokumen/Reko mendasi | | |
| d. | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | - | | Jumlah izin | | |
| e. | Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan | | | | | | Jumlah pemanfaatan | | |
| f. | Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati | | | | | | Lokasi | | |
| g. | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | Jumlah izin | | |
| h. | Pembudayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | | | Lokasi | | |
| i. | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu | | | | | | Dokumen/Reko mendasi | | |
| j. | Pembudayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya | | | | | | Unit | | |
| k. | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian | | | | | | Laporan | | |
| l. | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun | | | | | | Dokumen | | |
| m. | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun | | | | | | Laporan | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| n. | <p>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik</p> <p>1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk Appendix CITES melalui pengawasan, patroli dan sosialisasi</p> <p>2) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/KPA melalui invent potensi kehati spesies dan genetic</p> <p>3) Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi</p> <p>4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi</p> <p>5) Pengembangan sistem data base kehati daerah provinsi (Balai Kliiring)</p> <p>6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati</p> <p>7) Pembinaan dan edukasi kepada Kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan dan kawasan Konservasi</p> | | | | | Dokumen | | |
| o. | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | 8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial: | | | | | | | |
| | a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat | | | | | | | |
| | b) Penyediaan Sarpras Pengelolaan | | | | | | | |
| | c) Pendidikan/ Penelitian dan Penyadartahuan | | | | | | | |
| | d) Inventarisasi/ Monitoring Potensi Kehati | | | | | | | |
| | e) Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat | | | | | | | |
| 4. | Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial | | | | | | | |
| | a. Fasilitasi penyediaan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKM Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat | | | | | | Jumlah Lokasi | |
| | 1) Operasional POKJA PPS | | | | | | Jumlah Kegiatan | |
| | 2) Sosialisasi tingkat tapak | | | | | | Jumlah lokasi | |
| | 3) Fasilitasi Usulan Izin PS | | | | | | Jumlah Calon Lokasi PS | |
| | 4) Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat | | | | | | Jumlah Lokasi Konflik | |
| | 5) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/ atau | | | | | | Jumlah Komunitas MHA | |
| | 6) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan local | | | | | | Dokumen | |
| | b. Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|-------------------|---------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | 1) Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial | | | | | Jumlah Dokumen | | |
| | 2) Pelatihan pengembangan usaha/kerjasama usaha | | | | | Jumlah KUPS | | |
| | 3) Pelatihan pengembangan kewirausahaan | | | | | Jumlah KUPS | | |
| | 4) Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial | | | | | Jumlah KUPS | | |
| | 5) Pembangunan agroforestry | | | | | Jumlah KUPS | | |
| | 6) Pemberian bantuan alat ekonomi produktif | | | | | Paket | | |
| | 7) Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial | | | | | Unit | | |
| | a) Sarpras pendukung pelaksanaan pendampingan | | | | | Jumlah Pendamping | | |
| | b) Operasional Pendamping | | | | | Kegiatan | | |
| | 8) Pengawasan dan Pengendalian PS | | | | | Unit | | |
| | a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok PS | | | | | | | |
| | b) Sarpras pendukung pelaksanaan Money | | | | | | | |
| | Pemberian Akses Kelola Masyarakat melalui Kemitraan Konservasi (Hektar) | | | | | | | |
| c. | 1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Kemitraan Konservasi | | | | | Hektar | | |
| | 2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaan | | | | | Desa/Kelompok | | |
| | 3) Perjanjian Kerja Sama | | | | | Perjanjian | | |
| | 4) Pelatihan Masyarakat | | | | | Kelompok | | |
| d. | Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Konservasi | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | 1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa | | | | | Desa/Kelompok | | |
| | 2) Pembentukan Kelembagaan | | | | | Kelompok | | |
| | 3) Pelatihan Masyarakat | | | | | Kelompok | | |
| | 4) Pemberian Bantuan Usaha | | | | | Unit | | |
| 5. | Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | | |
| a. | Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | | |
| | 1) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan perlindungan hutan: | | | | | | | |
| | a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin (diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut) secara partisipatif. | | | | | Lokasi | | |
| | b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan melalui penguatan Resort Based Management (RBM). | | | | | Lembaga | | |
| | 2) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery); | | | | | Kegiatan | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan Hutso. | | | | | | | |
| | b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Masyarakat di Wilayah KPH. | | | | | | | |
| | c) Fasilitasi Pendampingan Penanganan Pascapanen dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH | | | | | | | |
| | 3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH | | | | | | | |
| | a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM | | | | | | Orang | |
| | b) Operasional KPH | | | | | | Bulan | |
| | 4) Pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNBP dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNBP (pengawasan, pengendalian dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha. | | | | | | Kegiatan | |
| | b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan: | | | | | | | |
| | Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multisaha kehutanan: | | | | | | | |
| | 1) Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. | | | | | | Kegiatan | |
| | 2) Fasilitasi pembangunan hutan pola agroforestry (Sytvopastura maupun Silvofishery). | | | | | | Kegiatan | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | 3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. | | | | | | Kegiatan | |
| | 4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan). | | | | | | Lembaga | |
| | 5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan sosial. | | | | | | Kegiatan | |
| c. | Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan: | | | | | | | |
| | 1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan hasil hutan skala kecil/UMKM. | | | | | | Lembaga | |
| | 2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM. | | | | | | Kegiatan | |
| d. | Penyusunan RPHJP dan RPHJpd (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJpd yang sudah disahkan) | | | | | | Jumlah Dokumen | |
| e. | Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan | | | | | | Laporan pengamanan hutan | |
| f. | Penyusunan data potensi SDH | | | | | | Data potensi SDH | |
| g. | Penataan batas blok dan petak (penataan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di | | | | | | Laporan | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---|----------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | lapangan) | | | | | | | | |
| | h. Monev Pemanfaatan Hutan | | | | | | Laporan dan rekomendasi tindak lanjut | | |
| | i. Monev Penggunaan kawasan hutan | | | | | | Laporan dan rekomendasi tindak lanjut | | |
| | j. Penyusunan rencana detil pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak | | | | | | Rencana bisnis, Desain Tapak | | |
| | k. Pengadaan Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan | | | | | | Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan | | |
| | l. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial | | | | | | Laporan Kegiatan | | |
| | m. Pembangunan resort | | | | | | Jumlah resort | | |
| | n. Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan | | | | | | Laporan Kegiatan | | |
| | o. Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial | | | | | | Laporan Kegiatan | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | Output | | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | p. Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka penguakuan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan | | | | | | Laporan Kegiatan | |
| | q. Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional | | | | | | Laporan Kegiatan | |
| | r. Fasilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH | | | | | | Laporan Kegiatan | |
| 6. | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | |
| | a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran) | | | | | | Lokasi | |
| | b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga | | | | | | Unit/Buku/lembar | |
| | c. Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnnya | | | | | | Unit/Lembar/lokasi | |
| | d. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu | | | | | | Unit/Lokasi | |
| | e. Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api | | | | | | Kelompok Masyarakat | |
| | f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) | | | | | | Lokasi/Kelompok | |
| | g. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar | | | | | | Km | |
| | h. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan | | | | | | Kg/Ton/kelompok masyarakat | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | 1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi | | | | | | Kg/Ton/kelompok masyarakat | |
| | 2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi | | | | | | Kg/Ton/kelompok masyarakat | |
| | 3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi | | | | | | Kg/Ton/kelompok masyarakat | |
| | 4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi | | | | | | Jenis dan Jumlah Usaha | |
| | 5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi | | | | | | Jenis dan Jumlah Usaha | |
| | i. Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air | | | | | | Unit | |
| | j. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi | | | | | | Kegiatan | |
| | k. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla | | | | | | Unit/Sistem | |
| | l. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan | | | | | | Desa | |
| | m. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya) | | | | | | Orang | |
| | n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla | | | | | | Unit | |
| | 1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla | | | | | | Unit | |
| | 2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla | | | | | | Unit | |
| | 3) Kendaraan/transportasi air | | | | | | Unit | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | 4) Pompa Jingga | | | | | | Unit | | |
| | 5) Pompa Induk | | | | | | Unit | | |
| | 6) Pompa Apung | | | | | | Unit | | |
| | 7) Selang | | | | | | Unit | | |
| | 8) Nozzle | | | | | | Unit | | |
| | 9) Peralatan tangan | | | | | | Unit | | |
| | 10) Pompa Pungung | | | | | | Unit | | |
| | 11) Peralatan Pribadi (APD) | | | | | | Unit | | |
| | 12) Perlengkapan Regu | | | | | | Unit | | |
| o. | Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | Posko | | |
| p. | Pelaksanaan Pemadaman Darat | | | | | | Hari Operasi | | |
| q. | Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan | | | | | | | | |
| | 1) Pengawasan areal bekas terbakar | | | | | | Lokasi/Hektar | | |
| | 2) Inventarisasi luas karhutla | | | | | | Lokasi/Hektar | | |
| | 3) Penaksiran kerugian | | | | | | Lokasi/Hektar | | |
| | 4) Koordinasi penanganan pasca karhutla | | | | | | Kegiatan/lokasi | | |
| r. | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura) | | | | | | | | |
| | 1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) | | | | | | Orang | | |
| | 2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api | | | | | | Hektar/Spot | | |
| | 3) Pemadaman Kebakaran Hutan | | | | | | Hektar | | |
| | 4) Penyediaan Sarpras Masyarakat | | | | | | Desa/Kelompok | | |
| | 5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | Unit | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------------|----------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) |
| | s. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla | | | | | | Unit/Sistem | | |
| | t. Pendirian posko Karhutla | | | | | | Posko | | |
| 7. | Perlindungan dan pengamanan hutan | | | | | | | | |
| | a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | Hektar | | |
| | b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | | | | | | Hektar | | |
| | c. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | | | | | | Hektar | | |
| | d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | | | Kegiatan | | |
| | e. Penjagaan di tempat-tempat tertentu | | | | | | Lokasi | | |
| | f. Patroli pengamanan | | | | | | Lokasi | | |
| | g. Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi | | | | | | | | |
| | 1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi | | | | | | Jumlah operasi | | |
| | 2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi illegal. | | | | | | Jumlah operasi | | |
| | h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi | | | | | | Kegiatan | | |
| | i. Penyebaran/Pembinaan Polisi Kehutanan | | | | | | Kegiatan | | |
| | j. Penyebaran/Pembinaan PPNS | | | | | | Kegiatan | | |
| | k. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Apel Siaga Pengamanan Hutan | | | | | | Kegiatan | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang | | |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|----------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | | Satuan (8) | % (9) |
| (1) | (2) | | | | | | | | |
| l. | Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut, Senjata Api dan Mobil Patroli) | | | | | | | | |
| m. | Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura) | | | | | | | | |
| | 1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) | | | | | | | | |
| | 2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) | | | | | | | | |
| | 3) Penyediaan Sarpras Perlindungan dan Pengamanan Hutan | | | | | | | | |
| 8. | Pengembangan perbenihan tanaman hutan | | | | | | | | |
| a. | Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas) meliputi: | | | | | | | | |
| | 1) Pembuatan batas areal sumber benih; | | | | | | | | |
| | 2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran dan analisis data dan seleksi); | | | | | | | | |
| | 3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging)); | | | | | | | | |
| | 4) Pemangkasan (pemangkas cabang, pemangkas tajuk dan pemangkas pucuk (<i>top pruning</i>)) | | | | | | | | |
| | 5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan); | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang | |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | | Satuan (8) |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | 6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit; pengamanan dari pencurian kayu, pengembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili dan papan nama; pencegahan dan pengendalian kebakaran); dan/atau | | | | | | | |
| | 7) Pemanfaatan/pengunduhan benih. | | | | | | | |
| b. | Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas), melalui: 1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas; 2) Pengumpulan benih dari individu/family plus; 3) Pembuatan rancangan penanaman; 4) Pembibitan; 5) Pemapanan 6) Penanaman dan pemeliharaan; 7) Evaluasi tegakan; 8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging)); dan/atau 9) Penetapan sumber benih. Pembuatan/pengadaan bibit: 1) Pembangunan persemaian; | | | | | | Hektar | |
| | | | | | | | Hektar | |
| | | | | | | | Hektar | |
| | | | | | | | Hektar | |
| | | | | | | | Hektar | |
| | | | | | | | Hektar | |
| | | | | | | | Hektar | |
| | | | | | | | Hektar | |
| | | | | | | | Hektar | |
| c. | | | | | | | Unit atau Batang | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | 2) Pengadaan bibit (tender); | | | | | | Unit atau Batang | |
| | 3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR); dan/atau | | | | | | Unit atau Batang | |
| | 4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | | | | | | Unit atau Batang | |
| d. | Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan, meliputi: | | | | | | | |
| | 1) Sertifikasi sumber benih; | | | | | | Kali | |
| | 2) Sertifikasi mutu benih; dan/atau | | | | | | Kali | |
| | 3) Sertifikasi mutu bibit. | | | | | | Kali | |
| e. | Pembinaan perbenihan tanaman hutan, dapat berupa: | | | | | | | |
| | 1) Bimbingan teknis; | | | | | | Kali atau Orang | |
| | 2) Pemantauan dan evaluasi; | | | | | | Kali atau Orang | |
| | 3) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau | | | | | | Kali atau Orang | |
| | 4) Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan, melalui: | | | | | | Kali atau Orang | |
| | a) Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih; | | | | | | Kali atau Orang | |
| | b) Pelatihan Penilaian Sumber Benih; | | | | | | Kali atau Orang | |
| | c) Pelatihan Pengujian Mutu Benih ; | | | | | | Kali atau Orang | |
| | d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit; | | | | | | Kali atau Orang | |
| | e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit | | | | | | Kali atau Orang | |
| 9. | Penyuluhan kehutanan | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | |
| (1) | (2) | | | | | | | | (10) |
| a. | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan: Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) | | | | | | Jumlah Lokasi | | |
| b. | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan: Fasilitas Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Posthutudes) | | | | | | Jumlah Lokasi | | |
| c. | Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan: 1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan; 2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan; 3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL; dan/atau 4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan. 5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh | | | | | | Orang | | |
| d. | Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL | | | | | | | | |
| e. | Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH | | | | | | Kelompok | | |
| f. | Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha: Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluh | | | | | | Unit | | |
| g. | Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk: 1) Metode penyuluhan: | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | a) Lomba wana lestari; | | | | | | | |
| | b) Termu teknis KTH; | | | | | | | |
| | c) Sekolah lapang; dan/atau | | | | | | | |
| | d) Workshop, dll. | | | | | | | |
| | 2) Materi Penyuluhan: | | | | | | | |
| | a) Media cetak (buku, majalah, leaflet, booklet, bulletin, modul, dll); dan/atau | | | | | | | |
| | b) Media elektronik (radio, TV dan online sistem) | | | | | | Jumlah Lokasi | |
| | c) Sekolah Lapang Tematik Unggulan (RHL/HHBK/Perhutanan Sosial/pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan) | | | | | | | |
| | h. Penyusunan Program (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi: | | | | | | | |
| | 1) Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrument <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> , <i>Impact Point</i> , <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya, dan/atau | | | | | | Dokumen | |
| | 2) Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) kehutanan. | | | | | | Dokumen | |
| | i. Monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan | | | | | | Laporan | |
| | j. Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|--|---------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| k. | Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana penyubuhan kehutanan yang terdiri atas: 1) Sarana perlengkapan perorangan; 2) Sarana dan prasarana pendukung utama; dan/atau 3) Sarana pendukung lainnya. | | | | | Unit | | |
| l. | Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha | | | | | Kegiatan | | |
| m. | Pendampingan Kegiatan RHL | | | | | Kegiatan | | |
| 10. | Program strategis lainnya | | | | | | | |
| a. | Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi: 1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau 2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. | | | | | Orang | | |
| b. | Penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi: 1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; 2) dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; 3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan; | | | | | Orang UMKM Kegiatan Orang | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang | | |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|----------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | | Satuan (8) | % (9) |
| (1) | (2) | | | | | | | | |
| | 4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan; | | | | | | | | |
| | 5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau | | | | | | | | |
| | 6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan. | | | | | | | | |
| | c. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa. | | | | | | | | |

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DBH DR KABUPATEN/ KOTA

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH DR

TAHUN ANGGARAN

KABUPATEN/ KOTA:

SEMESTER:

PAGU SISA DBH DR:

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang (10) | |
|-----|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | | % (9) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya | | | | | | | | |
| a. | Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya | | | | | | | | |
| | 1) Proses pengusulan dan penetapan pembangunan Tahura | | | | | | | | |
| | 2) Perencanaan: | | | | | | | | |
| | a) Penataan Blok Tahura | | | | | | Unit KK | | |
| | b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura | | | | | | Unit KK | | |
| | c) Kerjasama Pengelolaan Kawasan Tahura | | | | | | Jumlah Perjanjian Kerja Sama | | |
| | d) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Tahura | | | | | | Unit KK | | |
| | 3) Pengelolaan: | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang (10) |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | |
| | a) Penanganan open area (area terbuka) melalui penanganan konflik tenurial di Kawasan Tahura | | | | | | Hektar | |
| | b) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura bersama Masyarakat | | | | | | unit KK | |
| | c) Pengelolaan daerah penyangga Tahura | | | | | | Hektar | |
| | 4) Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik melalui perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati, Spesies dan Genetik di Tahura, melalui Inventarisasi dan Pemantauan Potensi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik | | | | | | Dokumen | |
| | 5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan | | | | | | Dokumen | |
| | a) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura | | | | | | Unit | |
| | b) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet) | | | | | | Unit KK | |
| | c) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura | | | | | | | |
| | 6) Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem | | | | | | | |
| | a) Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem | | | | | | Hektar | |
| | b) Penanaman bersama Masyarakat | | | | | | Hektar | |
| | c) Pemeliharaan Tanaman bersama Masyarakat | | | | | | Hektar | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang (10) | |
|-----|---|----------------|------------------|---|----------------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | | % |
| | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | | | | | | | | |
| b. | Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Tahura | | | | | | | | |
| | 1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) | | | | | Orang | | | |
| | 2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api | | | | | kegiatan | | | |
| | 3) Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan | | | | | kegiatan | | | |
| | 4) Penyadartahuan Masyarakat | | | | | Desa /kelompok | | | |
| | 5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | unit | | | |
| | 6) Pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung dan kantong air | | | | | unit | | | |
| | 7) Pembuatan sistem peringatan dini karhutla | | | | | kegiatan | | | |
| | 8) Pendampingan dan peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat (praktek pembukaan lahan tanpa bakar; pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar; pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; dsb) | | | | | kegiatan | | | |
| | 9) Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla, penyebarluasan informasi melalui Peta, infografis atau sejenisnya | | | | | kegiatan | | | |
| | 10) Penerapan deteksi dini (melalui menara pengawas, kamera/CCTV, penginderaan jauh) | | | | | Unit | | | |
| | 11) Pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi hotspot (Unit) | | | | | Unit | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang (10) |
|-----|---|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | |
| | 1.2) Penetapan posko dalkarhutla dan level kesiagaannya; | | | | | | Unit | |
| | 1.3) Pemadaman (pengukuran api atau size up, pembuatan ilaran api udara, penyapuan bara api atau mopping up, dsb) | | | | | | Hektar | |
| | 1.4) Pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalkarhutla. | | | | | | Unit | |
| | c. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya | | | | | | | |
| | 1) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Lokasi): | | | | | | | |
| | a) Penghitungan luas areal terbakar | | | | | | Hektar | |
| | b) Analisa dampak dan penaksiran kerugian | | | | | | Dokumen | |
| | c) Detasering terhadap areal pasca karhutla | | | | | | Hektar | |
| | 2) Pemulihan ekosistem areal bekas terbakar yang melibatkan masyarakat | | | | | | Hektar | |
| | 3) Penanganan Kasus: | | | | | | | |
| | a) Koordinasi dalam rangka investigasi dan penyidikan penyebab kejadian karhutla | | | | | | Kali | |
| | b) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum (bila perlu) | | | | | | Kali | |
| 2. | Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | | | | | | | |
| | a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran) | | | | | | Lokasi | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang (10) |
|-----|--|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| b. | Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga | | | | | | Unit/Buku | |
| c. | Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnnya | | | | | | Unit/Lembar | |
| d. | Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu | | | | | | Unit/Lokasi | |
| e. | Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api | | | | | | Kelompok | |
| f. | Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) | | | | | | Lokasi | |
| g. | Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar | | | | | | Km | |
| h. | Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan kewenangannya: 1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi 2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi 3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi 4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi 5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi | | | | | | Kg/Ton/kelompok masyarakat | |
| i. | Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air | | | | | | Jenis dan Jumlah Usaha | |
| | | | | | | | Jenis dan Jumlah Usaha | |
| | | | | | | | Unit | |

| No. (1) | Program/Kegiatan (2) | Anggaran | | | Output | | | | Realisasi Kegiatan Penunjang (10) |
|------------|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | |
| j. | Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi | | | | | | Kegiatan | | |
| k. | Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla | | | | | | Unit/Sistem | | |
| l. | Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan | | | | | | Desa | | |
| m. | Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya) | | | | | | Orang | | |
| n. | Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla | | | | | | | | |
| | 1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla | | | | | | Unit | | |
| | 2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla | | | | | | Unit | | |
| | 3) Kendaraan/transportasi air | | | | | | Unit | | |
| | 4) Pompa Jingga | | | | | | Unit | | |
| | 5) Pompa Induk | | | | | | Unit | | |
| | 6) Pompa Apung | | | | | | Unit | | |
| | 7) Selang | | | | | | Unit | | |
| | 8) Nozzle | | | | | | Unit | | |
| | 9) Peralatan tangan | | | | | | Unit | | |
| | 10) Pompa Punggung | | | | | | Unit | | |
| | 11) Peralatan Pribadi (APD) | | | | | | Unit | | |
| | 12) Perlengkapan Regu | | | | | | Unit | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|--|--|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| 3. | o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | Posko | |
| | p. Pelaksanaan Pemadaman Darat | | | | | | Hari Operasi | |
| | q. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla | | | | | | Unit/Sistem | |
| | r. Pendirian posko Karhutla | | | | | | Posko | |
| | Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya | | | | | | | |
| | Penyeleenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan | | | | | | Kegiatan/Lokasi/Hektar | |
| 4. | a. Pengawasan areal bekas terbakar | | | | | | Lokasi/Hektar | |
| | b. Inventarisasi luas karhutla | | | | | | Lokasi/Hektar | |
| | c. Penaksiran kerugian | | | | | | Lokasi/Hektar | |
| | d. Koordinasi penanganan pasca karhutla | | | | | | Kegiatan/Lokasi | |
| 5. | Penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air | | | | | | | |
| | a. Pembibitan | | | | | | Batang | |
| | b. Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis | | | | | | Hektar | |
| | c. Penanaman pada kawasan perlindungan setempat | | | | | | Hektar | |
| | d. Penanaman rehabilitasi DAS dalam dan luar kawasan berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK | | | | | | Hektar | |
| e. Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) | | | | | | Unit | | |
| | Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang (10) | |
|-----|--|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|-----------------------------------|-------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | | % (9) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Hijau | | | | | | | | |
| | a. Perencanaan RTH | | | | | | Dokumen/Rekomendasi | | |
| | b. Pengadaan lahan RTH | | | | | | Luas lahan/Hektar | | |
| | c. Perancangan teknik RTH | | | | | | Dokumen/Rekomendasi | | |
| | d. Pelaksanaan pembangunan RTH | | | | | | Luas lahan/Hektar | | |
| | e. Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH | | | | | | Luas lahan/Hektar | | |
| 6. | Penyuluhan Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| | a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | Persentase | | |
| | b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | Kegiatan | | |
| | c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | jumlah masyarakat/jelompok usaha/kegiatan yang terlibat | | |
| | d. Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan | | | | | | Kegiatan | | |
| 7. | Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya | | | | | | | | |
| | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial: | | | | | | Unit KEE | | |
| | a. Patroli Pengamanan bersama Masyarakat | | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | Realisasi Kegiatan Penunjang |
|-----|---|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------|------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | |
| (1) | (2) | | | | | | | (10) |
| | b. Penyediaan Sarpras Pengelolaan Pendidikan/ Penelitian dan Penyadartahuan | | | | | | | |
| | c. Inventarisasi/ Monitoring Potensi Kehati | | | | | | | |
| | d. Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat | | | | | | | |
| | e. Pengelolaan keanekaragaman hayati | | | | | | | |
| 8. | a. Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik | | | | | | Dokumen | |
| | b. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik | | | | | | Dokumen | |
| | c. Pengembangan Sistem Database Kehati, Spesies dan Genetik (Balai Kliring) | | | | | | Unit | |
| | d. Pencadangan sumber daya alam hayati melalui pengelolaan Taman Kehati melalui penanaman Pohon Langka sesuai Ekoregion dan Ruang Terbuka Hijau (Jenis) | | | | | | Jenis | |
| | e. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi | | | | | | Unit | |
| 9. | Program strategis lainnya | | | | | | | |
| | a. Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi: | | | | | | | |
| | 1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau | | | | | | Orang | |
| | 2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. | | | | | | Orang | |
| | b. Penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi: | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Output | | | | Realisasi Kegiatan Penunjang (10) |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| | | Rencana (3) | Realisasi (4) | % (5) | Rencana (6) | Realisasi (7) | Satuan (8) | % (9) | |
| (1) | (2) | | | | | | | | |
| | 1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; | | | | | | UMKM | | |
| | 2) dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial; | | | | | | Kegiatan | | |
| | 3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan; | | | | | | Orang | | |
| | 4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan; | | | | | | Orang | | |
| | 5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau | | | | | | Orang | | |
| | 6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan. | | | | | | Lokasi | | |
| | c. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa. | | | | | | Daerah/Desa | | |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAMATI